



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 6/16.1/31.75/-1.862.9/e/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTI ERNANINGSIH, SH, MH
Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : FIRMANSYAH ZULKHARNAIN FADHERI
NIK : 3173082606940001
Alamat : JOGLO NO.61 RT 6 RW 6 RT/RW. 6/6 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pekerjaan : mahasiswa
Instansi / Lembaga : universitas muhammadiyah yogyakarta
Alamat Instansi / Lembaga : jl. lingkaran selatan, tamantirto, kasihan, Bantul yogyakarta KEL. BANTUL KEC. BANTUL, KABUPATEN BANTUL, DI Yogyakarta

Untuk melaksanakan survey/penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
Instansi/Lembaga Lokasi Penelitian : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Bidang Penelitian : RISET
Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 11 Januari 2017
b. Berakhir : 31 Maret 2017

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan/Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 6/16.1/31.72/-1.862.9/e/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAMHOT TAMBUNAN
Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : FIRMANSYAH ZULKHARNAIN FADHERI
NIK : 3173082606940001
Alamat : JOGLO NO.61 RT 6 RW 6 RT/RW. 6/6 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi / Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Instansi / Lembaga : Jalan Lingkar selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 KEL. BANTUL KEC. BANTUL, KABUPATEN BANTUL, DI Yogyakarta

Untuk melaksanakan survey/penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
Instansi/Lembaga Lokasi Penelitian : Masyarakat pesisir pantai utarac(Kampung Nelayan)
Bidang Penelitian : Kuisisioner
Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 10 Januari 2017
b. Berakhir : 31 Maret 2017

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan/Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanggal : 10 Januari 2017
KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

LAMHOT TAMBUNAN
NIP. 197301252000031005



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 7/16.1/31.72/-1.862.9/e/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAMHOT TAMBUNAN
Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : FIRMANSYAH ZULKHARNAIN FADHERI
NIK : 3173082606940001
Alamat : JOGLO NO.61 RT 6 RW 6 RT/RW. 6/6 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pekerjaan : mahasiswa
Instansi / Lembaga : universitas muhammadiyah yogyakarta
Alamat Instansi / Lembaga : Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta KEL. BANTUL KEC. BANTUL, KABUPATEN BANTUL, DI Yogyakarta

Untuk melaksanakan survey/penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
Instansi/Lembaga Lokasi Penelitian : BALITBANG KP KKP
Bidang Penelitian : RISET
Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 11 Januari 2017
b. Berakhir : 31 Maret 2017

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan/Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanggal : 10 Januari 2017
KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

LAMHOT TAMBUNAN
NIP. 197301252000031005



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Gedung A Lt 6 Jl. DI Pandjaitan Kav 24, Kebon Nanas – Jakarta Timur 13410
Telepon (021) 85904925; Faksimile 85906168

Nomor : S-180/POLUK/ALH01/PLK.4/2/2017 1 Maret 2017
Hal : Izin Penelitian


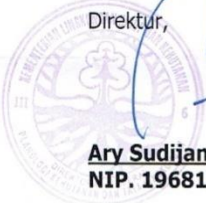
Yth. Ketua Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 061/A.4-II/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Perihal Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah Zulkarnain Fadheri
No. Mahasiswa : 20130610299
Alamat : Jl. Solo-Yogya, Prambanan, Desa Sengan
Judul Skripsi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi
Pantai Utara Jakarta

telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi pendukung terkait dampak lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sesuai dengan prosedur pada tanggal 1 Maret 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,


Ary Sudijanto
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan).

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Tedeputra, S.Sos.
Jabatan : Direktur Eksekutif WALHI Jakarta

Dengan Ini Menyatakan bahwa:

Nama : Firmansyah Zulkarnain Fadheri

Nim : 20130610299

Pragra studi : Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

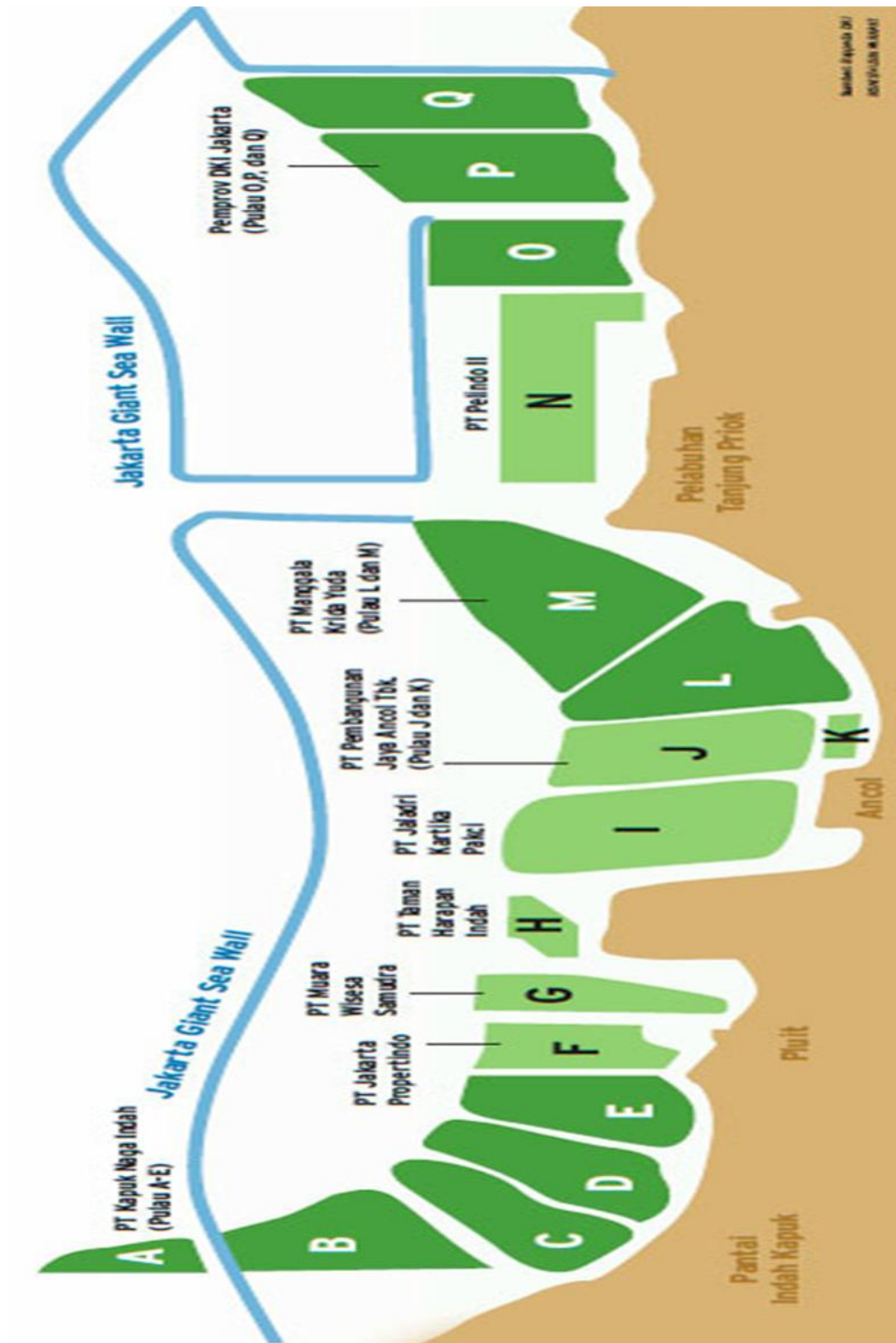
Telah melakukan Wawancara, untuk mendapatkan Gelar kesarjanaan Pada Fakultas Hukum UMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



d/a Zulkarnain Fadheri
manajer program dan
kampanye WALHI JAKARTA

Gambar 0.2 Denah pembangunan reklamasi tujuh belas pulau



Gambar 0.3 Data perizinan 17 pulau reklamasi

6) PERIZINAN 17 PULAU REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

No Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012			Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
		Sub Kawasan	Pulau	Luas					
1	643	Barat	A	79 Ha					
2	673		B	380 Ha					
3	242	60%	C	276 Ha	PT Kapuk	AMDAL Reklamasi Pantai Kapuk Niaga Indah (Pulau 2A, 2B dan 1)	Persetujuan Prinsip Reklamasi Kapuk Niaga Indah Nomor 1571/-1.711 tanggal 19 Juli 2007	Rekomendasi Andal RKL RPL Reklamasi No. 25/Andal/1.774.151 tanggal 28 September 2007	- Persetujuan prinsip reklamasi Pulau 2A Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711 tanggal 19 Juli 2007
4	279	60%	D	312 Ha	Naga Indah		Izin Prinsip Reklamasi Pulau 1 dan 2B SK Gub Prov. DKI Jakarta No. 804/-1.794.2 Tanggal 21 Juni 2012	Rekomendasi Reklamasi Pantai (Pulau 2A, 2B, dan 1) Nomor: 27/Andal/-1.774.151 Tanggal 07-08-2012	- Surat Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Pengurangan Reklamasi Pulau 2 A No. 039/KNI/PIK/IV/2007 tanggal 10 September 2007
5	277		E	284 Ha			Persetujuan prinsip reklamasi Pulau A dan Pulau B Surat Gubernur Nomor 1289/-1.794.2 tanggal 21 September 2012		- Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 2A SK Gub No. 14931/2010 tanggal 6 Agustus 2010 - Surat Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Pengurangan Reklamasi Pulau 1 dan 2 B No. 027/KNI/PIK/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 2007 - Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 dan Pulau 2B Nomor 1417/2012

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
			Sub Kawasan	Pulau					
6		245		F	190 Ha	Amdal Rencana Reklamasi Pulau F	- Prinsip Reklamasi Pulau F SK Gub. No. 1290/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 - Perpanjangan Prinsip Reklamasi Pulau F SK Gub. No. 544/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014	2014 - SK Kelayakan Lingkungan : 127 Tahun 2014 Tanggal 18-03-2014	Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 Surat rekomendasi keselamatan pelayaran untuk kegiatan pengerukan Pulau F dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandar dan otoritas pelabuhan kelas III Sunda Kelapa No. PP. 2011/12/KSOP-SKA/14 tentang Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Untuk Kegiatan Pengerukan Pulau F tertanggal 08 Desember 2014
7	206		100%	G	161 Ha	Amdal RKL-RPL	- Prinsip Reklamasi	- Rekomendasi	- Izin Pelaksanaan

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
			Sub Kawasan	Luas Pulau						
					Wiseca Samudra		Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta	Pulau G SK Gub No. 1291/1.794.2 tanggal 21 September 2012 - Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G SK Gub No. 542/- 1.794.2 tanggal 10 Juni 2014	RKL RPL Nomor: 648/-1.776/X/87 Tanggal 20 Oktober 1987 - Rekomendasi AMDAL No. 324/182.4/VII/8 7 tanggal 6 Juli 1987 - Rekomendasi Ardal RKL RPL Nomor 30/Andal/1.774.151 Tanggal 30 Juli 2013 - SKKL Nomor 107 Tahun 2014 Tanggal 07-02-2014 - Izin Lingkungan Nomor 108 Tahun 2014 Tanggal 07-02-2014	Reklamasi Pulau G SK Gub Nomor: 2238 Tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 - Izin Pelaksanaan Pekerjaan Reklamasi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Pulau G di Kawasan Pantai Utara Jakarta di Dalam DLK dan DLKp Pelabuhan Sunda Kelapa SK Dirjen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan No: BX-422/PP207 tanggal 19 Agustus 2015 - Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa Kelurahan Pluit Kecamatan Penjarangan Wilayah Kotamadya Jakarta Utara SK Dirjen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan No: BX-251/PP207 tanggal 20 Mei 2015

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
			Sub Kawasan	Pulau						
8				H	PT. Taman Harapan Indah	63 Ha	Andai RKL-RPL Reklamasi Pulau H (Luas + 63 Ha)	- Prinsip Reklamasi Pulau H SK Gub No. 1277/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 - Perpanjangan Peretujuan Prinsip Reklamasi Pulau H SK Gub No. 543/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014	- Amdal No. 56/-1.777.6/1/90 tanggal 22 Januari 1990 - 26.1/Rekom-Andai/-1.774.151 Tanggal 08-06-2015 - SK Kelayakan LH Nomor 33/7.4/31/1.774 .1/2015 Tanggal 15 Juli 2015 - SK Izin Lingkungan Nomor 33/7.1/31/1.774 .1/2015 Tanggal 15 Juli 2015	- Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H SK Gub Nomor: 2637 Tahun 2015 Tanggal 30 November 2015
9		154	Tengah	I	PT Jaladri Kartika Ekapaksi	202,5 Ha	Andai RKL-RPL Reklamasi Pulau I Bagian Barat	- Prinsip Reklamasi Pulau I SK Gub No. 1292/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 - Perpanjangan Peretujuan Prinsip Reklamasi Pulau I SK Gub No. 541/-	- 24/Rekom-Andai/-1.774.151 Tanggal 26-05-2015 - SKKL Nomor: 21/7.4/31/1.774 .1/2015 Tanggal 17-06-	- Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I SK Gub Nomor: 2269 Tahun 2015

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
			Sub Kawasan	Pulau						
								1.794,2 tanggal 10 Juni 2014	2015 - Izin Lingkungan Reklamasi Pulau I Bagian Barat seluas 202,5 Ha Nomor: 21/7.1/31/1.774 .1/2015 Tanggal 17-06-2015	
			I		PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk			- Prinsip Reklamasi Pulau I SK Gub No. 1275/-1.794.2 tanggal 21 September 2012	-	
10		726	J	316 Ha	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk			- Prinsip Reklamasi Pulau J SK Gub No. 1276/-1.794.2 tanggal 21 September 2012		
11			K	32 Ha	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	32 Ha	Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau K	- Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K SK Gub No. 1295/-794.2 tanggal 21 September 2012 - Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K SK Gub No. 540/-	- 26/Rekom-Andal/-1.774.151 Tanggal 08-06-2015 - Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K Nomor : 23/7.1/31/1.774 .1/2015	- Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi		
			Sub Kawasan	Pulau						Luas	
12				L	481 Ha	PT Pembangunan Jaya Ancol	119 Ha	<p>Pengembangan Kawasan Ancol Barat Bagian Timur (Perubahan Material Tanggul Utara dari Sand Dune menjadi Geotube/Geodyke)</p> <p>Lokasi ini tempat penempatan pembersihan lumpur (Dumping site) hasil kerukan 13 sungai dan 6 waduk berdasarkan SK Gub No. 1776/-1.793.43 tanggal 25 Agustus 2008. Sehingga terjadi perubahan material keruk</p>	<p>1.794.2 tanggal 10 Juni 2014</p> <p>- Persetujuan Prinsip Reklamasi Tahap II di Perairan Ancol Barat seluas ±343 Ha, yang terletak di Kelurahan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara SK Gub No. 1288/-1.711.5 tanggal 17 Mei 2004</p>	<p>Tanggal 09-06-2015</p> <p>- SKKL Nomor : 23/7.4/31/1.774 .1/2015 Tanggal 09-06-2015</p> <p>- Rekomendasi Updating RKL RPL Nomor: 17/Andal/-1.774.151 Tanggal 8 April 2011 (perubahan material tanggul utara</p> <p>- Rekomendasi Updating RKL RPL Nomor: 48/Andal/-1.774.151 Tanggal 07-10-2011</p>	

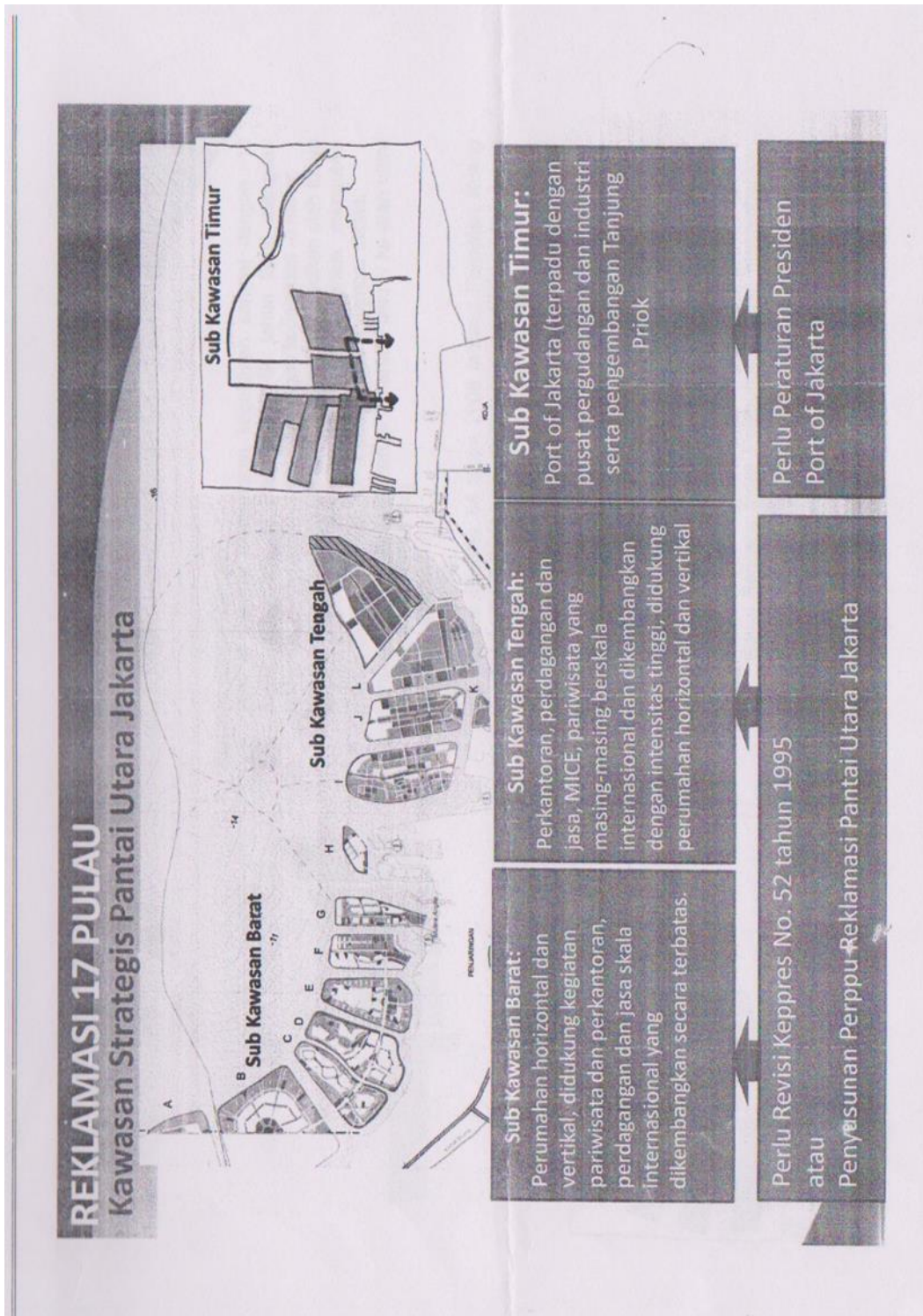
No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)	Pergub 121 Tahun 2012		Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
			Sub Kawasan	Luas Pulau						
13		351		M	PT Manggala Krida Yudha		yang semula pasir laut menjadi material hasil keruk sungai Updating RKL-RPL Reklamasi Pantai Ancol Timur Jakarta 150 Ha (Rekomendasi 1.794.2 tanggal 21 September 2012 RPL Reklamasi Nomor 10/- 1.777.6 tanggal 2 April 2004 (Kadaluarsa))	Prinsip Reklamasi Pulau M Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1283/- 1.794.2 tanggal 21 September 2012		
14		481	Timur	M	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	180 Ha (areak reklamasi I B)	Dokumen Amdal kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok Tahap I (Kegiatan reklamasi Area I B luas 180 Ha)		- Izin Lingkungan Keputusan MenLH RI No. 293 Thn 2012 Tanggal 21-12-2012 - IL : 02.16.04 Tahun 2015 Tanggal 09-04-2015 - SKKL : 011.7.04 Tahun 2015	

No	Pulau	Luas Sesuai RTRW (Ha)		Pergub 121 Tahun 2012		Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan	Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
		Sub Kawasan	Pulau	Luas							
15				O	344 Ha	PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta			prinsip reklamasi pulau O Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 1281/1.794.2 tanggal 21 September 2012	Tanggal 09-04-2015	
16		513		P	463 Ha						
17		524		Q	369 Ha						

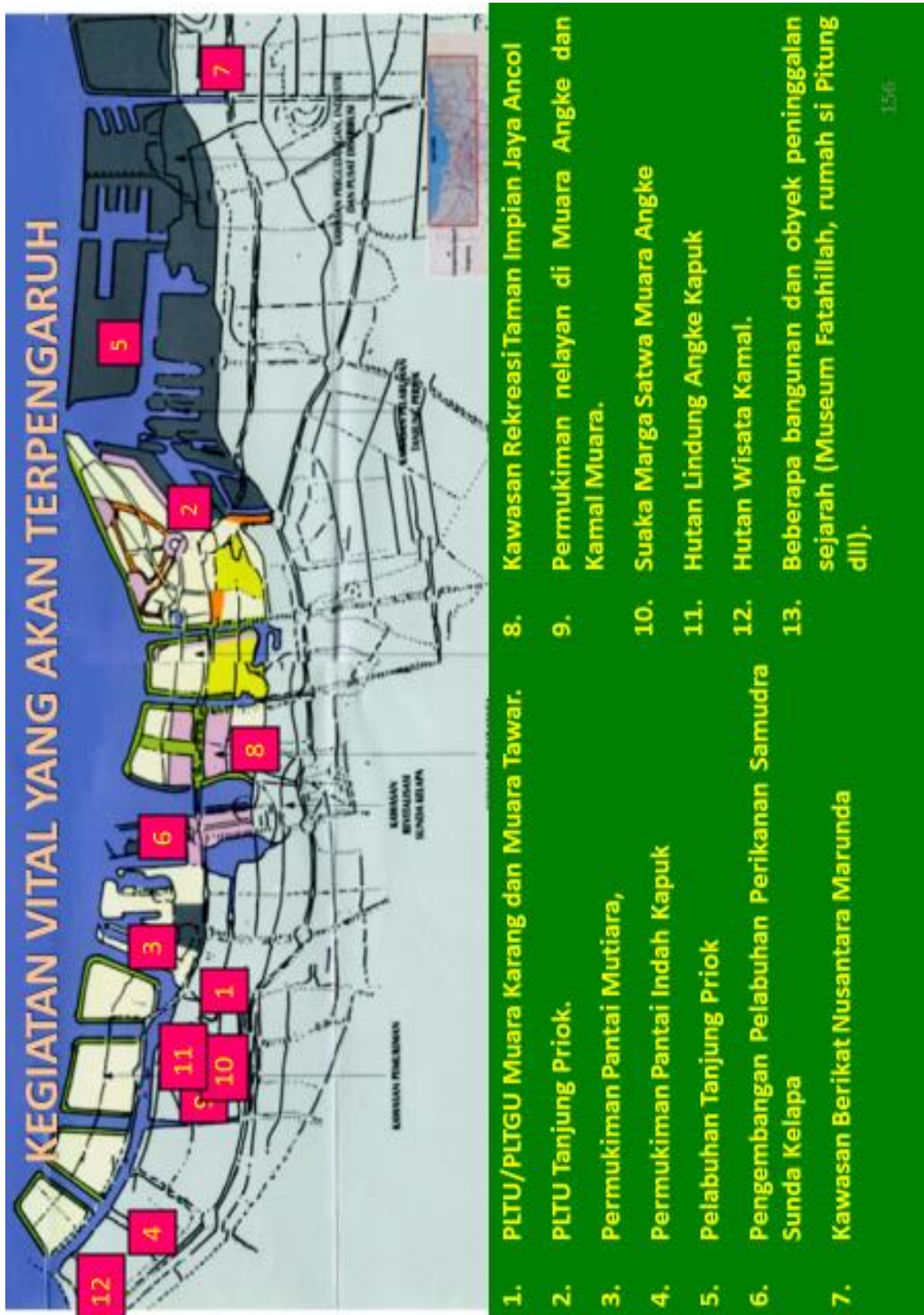
PERIZINAN REKLAMASI PANTAI UTARA KABUPATEN TANGERANG

Pulau	Pemrakarsa	Luas Sesuai Izin Lingkungan (M ²)		Dokumen Lingkungan	Izin Prinsip	SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	Izin Reklamasi
1	PT Tangerang Internasional City (± 75.181.573 m ² / 7.518,2 ha)	7.684.143		Amdal rencana pembangunan reklamasi Kota Baru PT Tangerang Internasional City, kec. Kosambi, Kecamatan Kemiri, kec. Teluknaga, kec. Pakuhaji, kec. Sukadiri		SK Kelayakan Lingkungan . No. 660/09- BP21/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemberian persetujuan kelayakan lingkungan hidup	Surat Izin Reklamasi dari Bupati Tangerang No. 690/Kep. 442 – HUK/2010 tentang Izin Reklamasi Laut Pantai Utara Kabupaten Tangerang tertanggal 4 November 2010
2		8.535.853					
3		12.809.484					
4		16.243.256					
5		14.337.824.000					
6		15.571.013.000					

Gambar 0.4 Rencana kawasan strategis reklamasi Pantai Utara Jakarta



Gambar 0.5 Data kegiatan yang terpengaruh akibat reklamasi



Gambar 0.6 Data Gangguan operasional

HASIL KAJIAN GANGGUAN OPERASIONAL PLTU/PLTGU MUARA KARANG

Air pendingin (cooling water) tidak mengalami pencampuran yang sempurna di laut lepas, shg terjadi kenaikan suhu air yang masuk ke kanal *intake*. Hal ini akan menurunkan efisiensi mesin pembangkit.

ARAH ANGIN	LOKASI GAGE PLOT	PERUBAHAN RELATIF TEMP. AIR (TERHADAP KONDISI EKSISTING, %)	
		MAKS	MIN
TIMUR LAUT	MK1	1,10	0,23
	MK2	18,79	4,53
	MK3	13,32	5,84
	MK4	-0,69	-4,48
BARAT LAUT	MK1	1,17	0,01
	MK2	18,91	5,64
	MK3	12,31	5,96
	MK4	0,01	0,00

30°C

↓

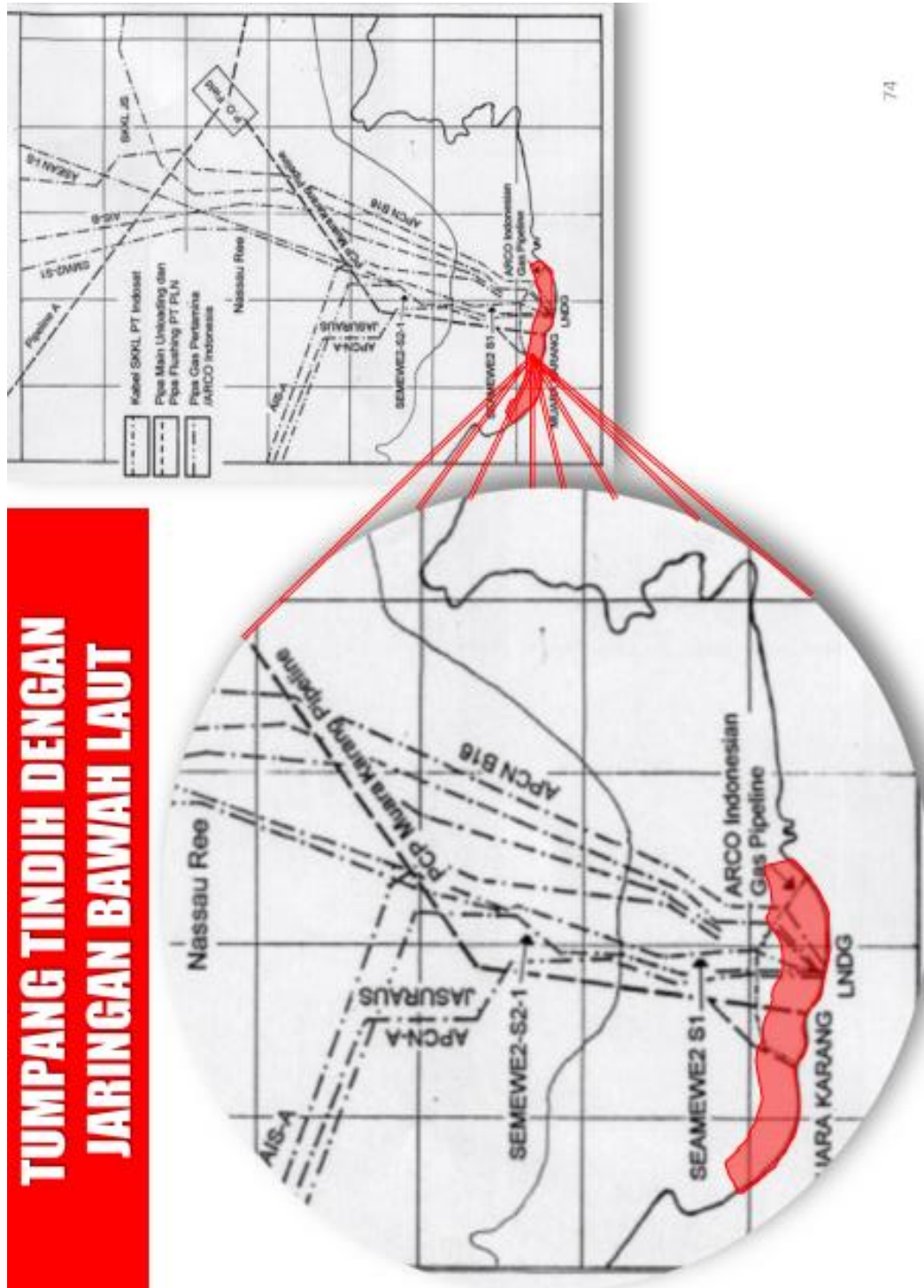
35,7°C

Respon Biologis < 30C

Terjadinya pendangkalan kanal *intake* akibat sedimentasi yang akan menurunkan kehandalan unit pembangkit.

Reklamasi menyebabkan perubahan keseluruhan desain mesin pembangkit

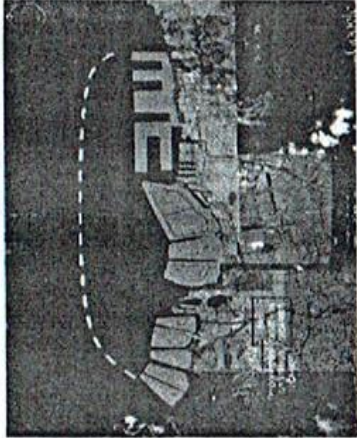
Gambar 0.7 Pengaruh bawah laut. Penilaian dokumen lingkungan hidup



PERKEMBANGAN KONSEP PERLINDUNGAN PESISIR IBUKOTA NEGARA



Konsep 1. Tanggul Laut diintegrasikan dengan 17 Pulau Reklamasi*



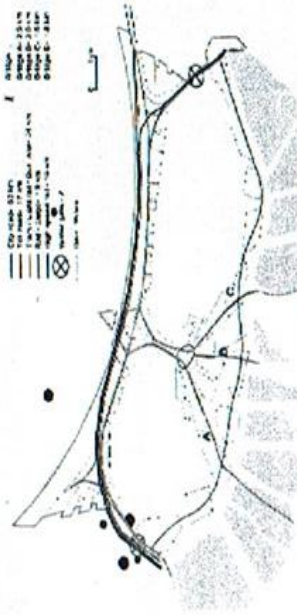
Konsep 2. Tanggul Laut dibangun pada kedalaman -18 meter*



Konsep 3. Tanggul Laut dibangun dengan menghubungkan Pulau Eksiting*



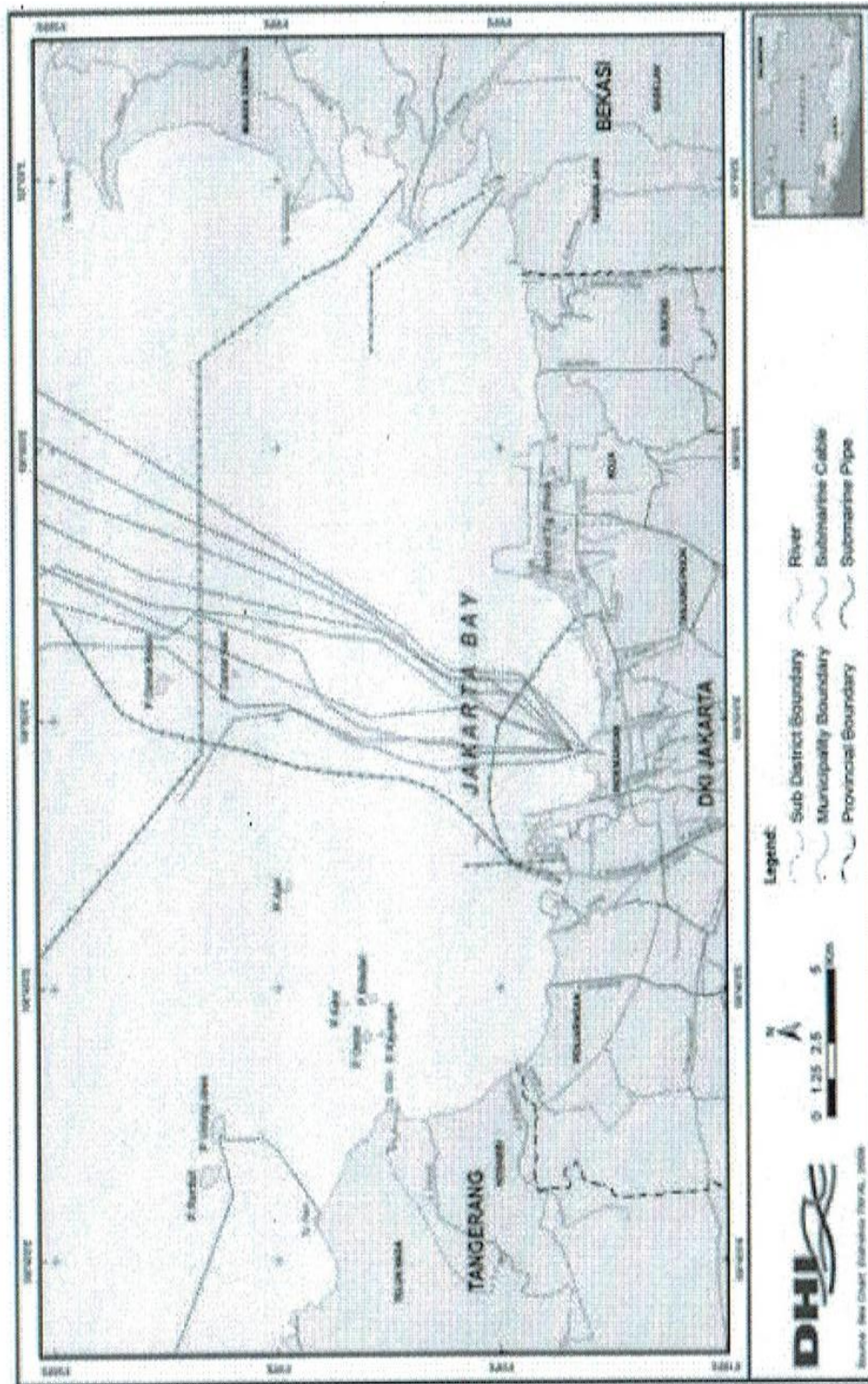
Konsep 4. Sea Defence dalam JCDS*



Konsep 5. Sea Defence dalam NCICD**

Sumber: *) JSDS (2012), diolah
 **) Master Plan NCICD (2014), diolah

Gambar 0.8 Data pipa dibawah Laut

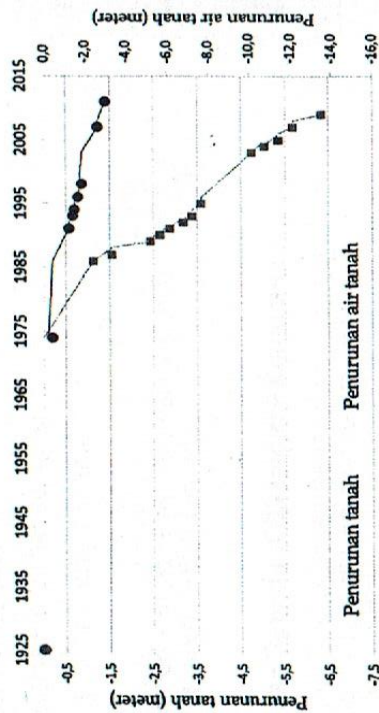


Gambar 0.9 Data Penurunan Tanah

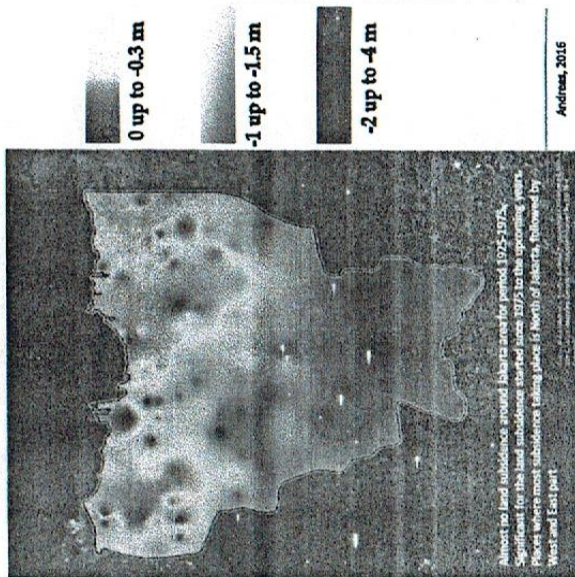
Gambar 4.24 Pipa dan kabel bawah laut dengan daratan di Teluk Jakarta

4. Seberapa cepat air turun di Jakarta?

Penurunan tanah versus penurunan muka air

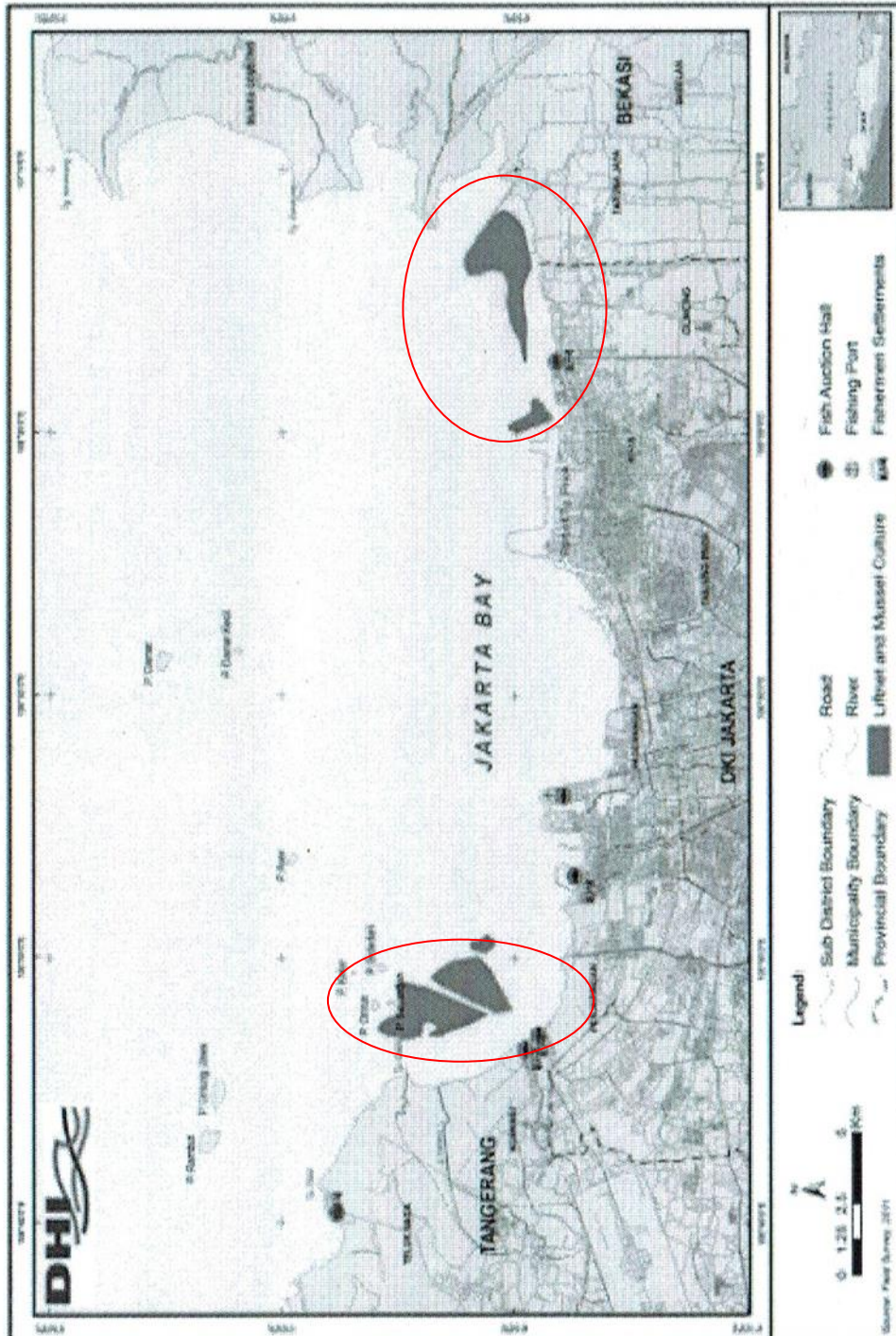


Land Subsidence Jakarta 1925-2015



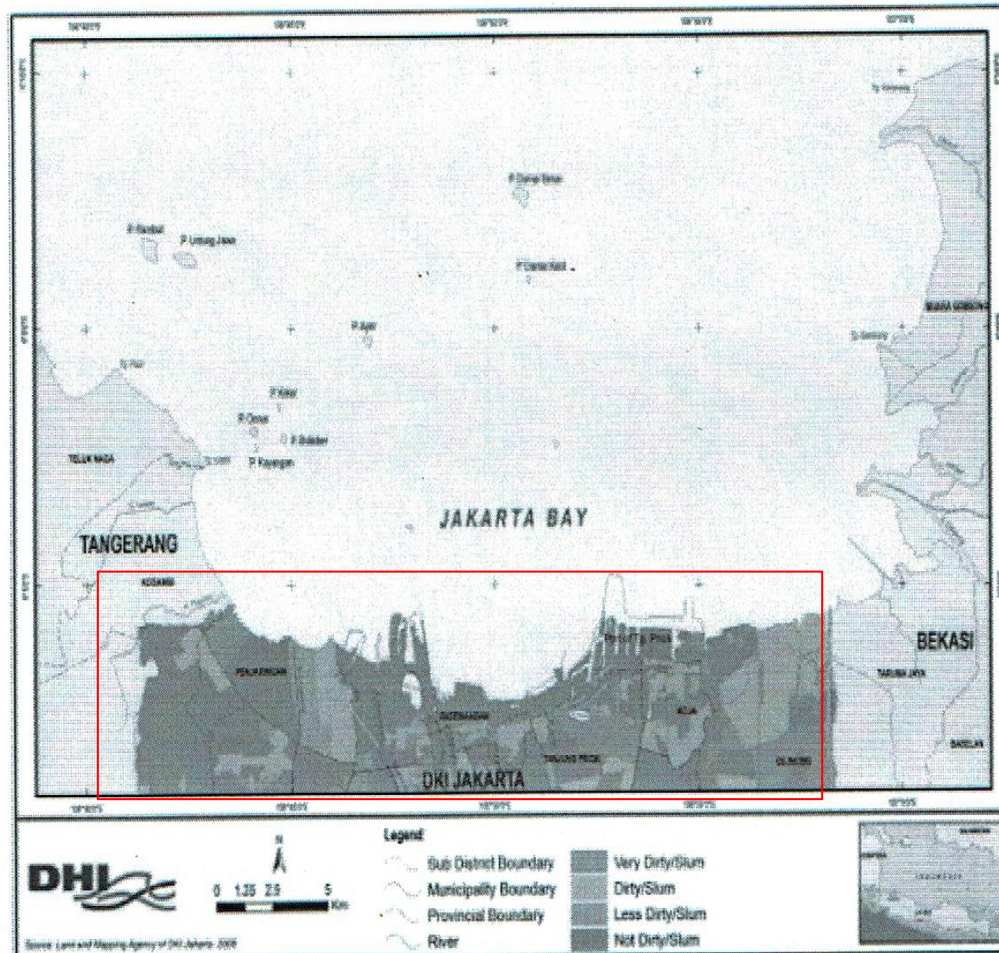
- Penurunan tanah antara lain akibat abstraksi air tanah dalam
- Rata-rata penurunan tanah di DKI Jakarta adalah 5 cm /tahun. Penurunan paling tinggi mencapai 18 cm/tahun di Pantai Mutiara.

Gambar 1.0 Data area penangkapan ikan



Gambar 4.28 Daerah Penangkapan Ikan (bubu, bagan and budidaya kerang hijau) di Teluk Jakarta

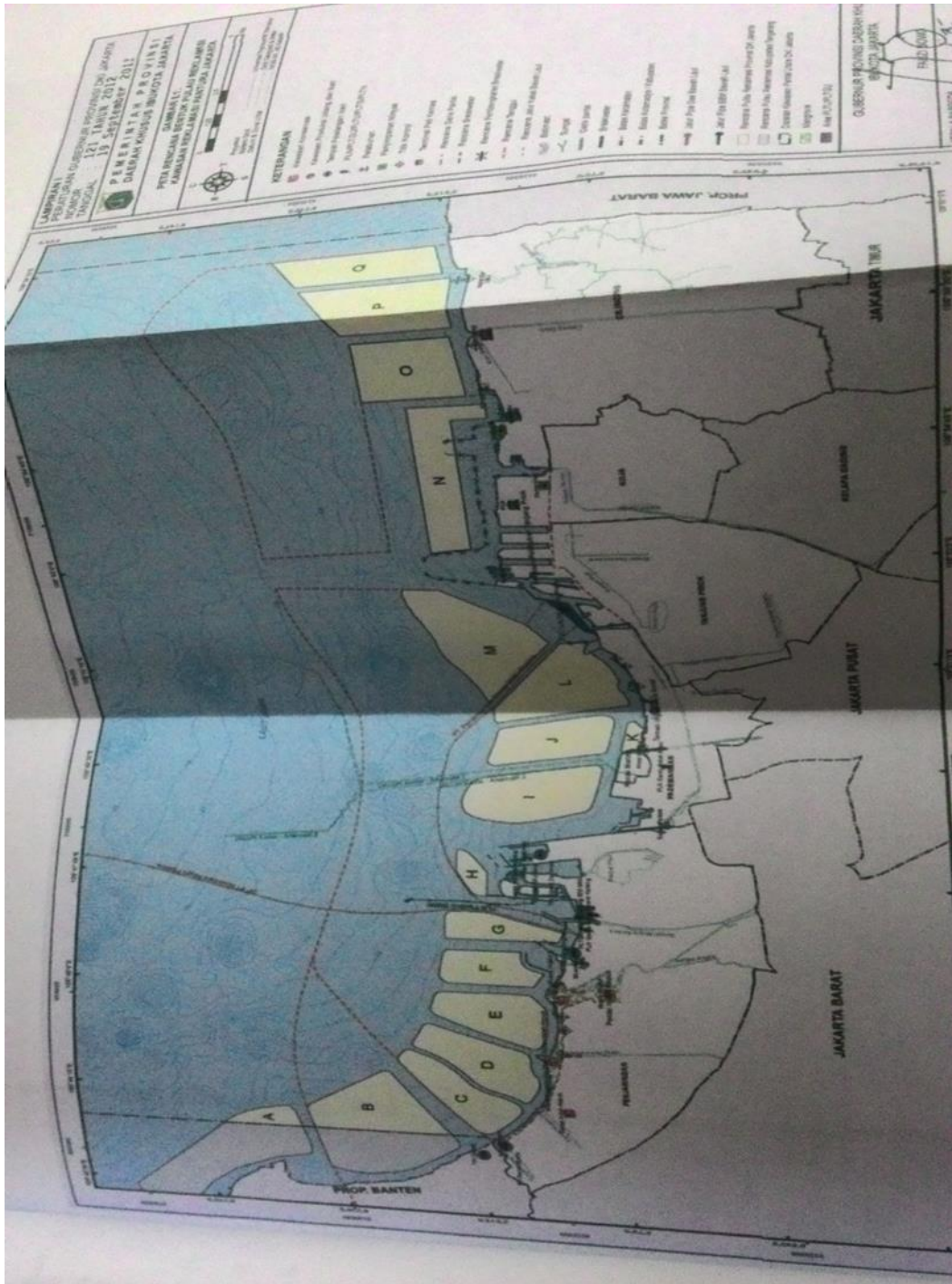
Gambar 1.1 Data kawasan Kumuh Jakarta

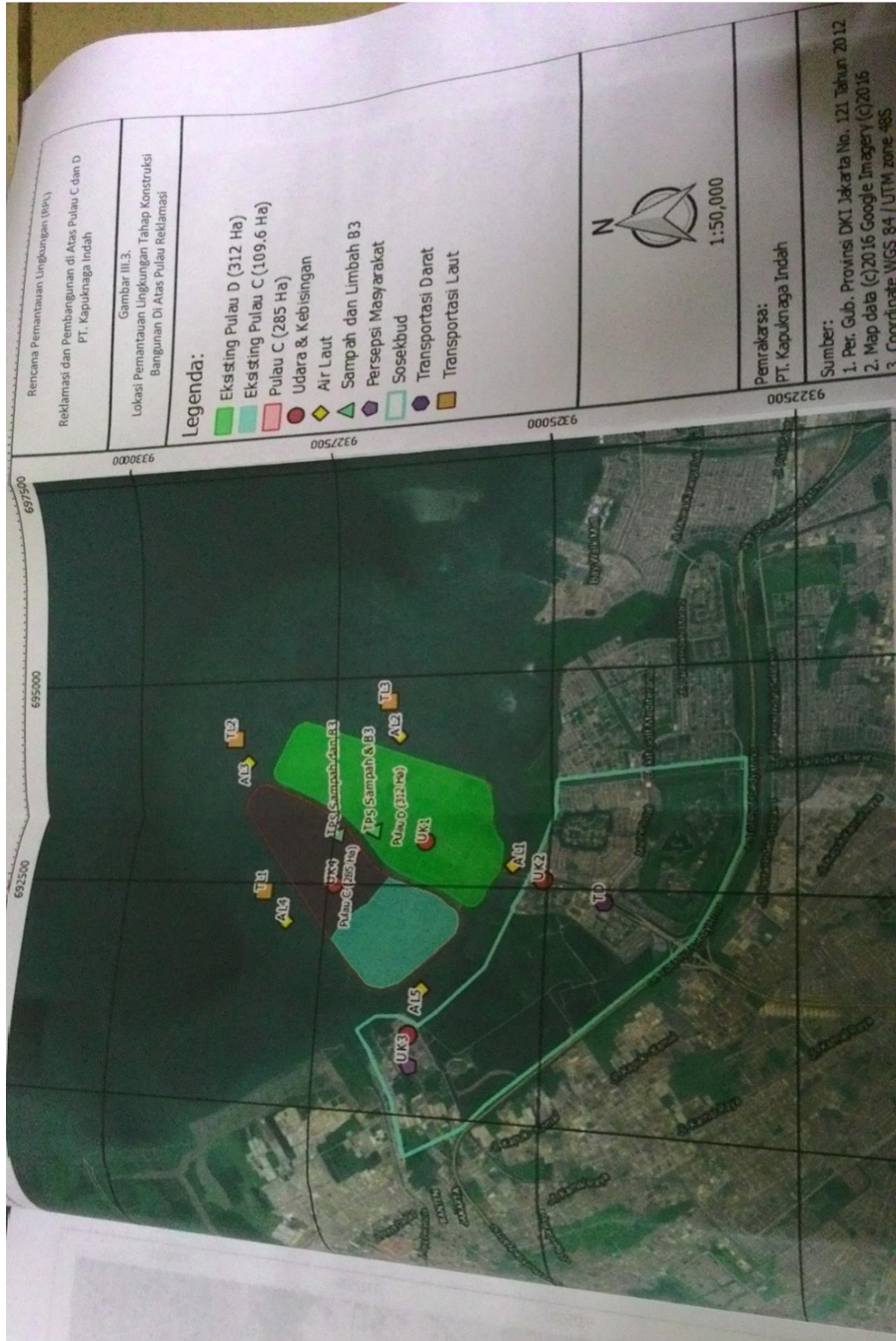


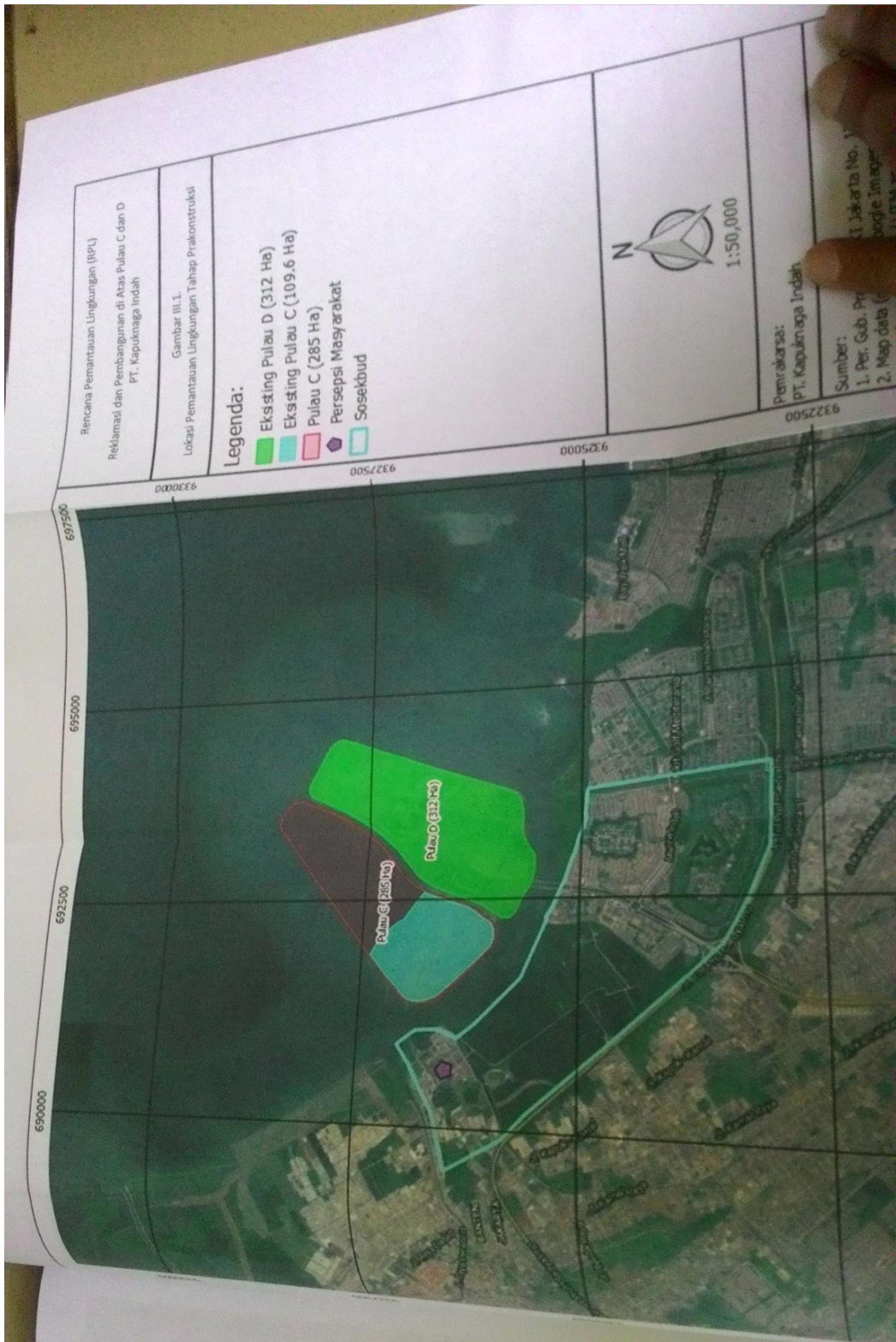
Gambar 4.20 Kawasan kumuh di Jakarta

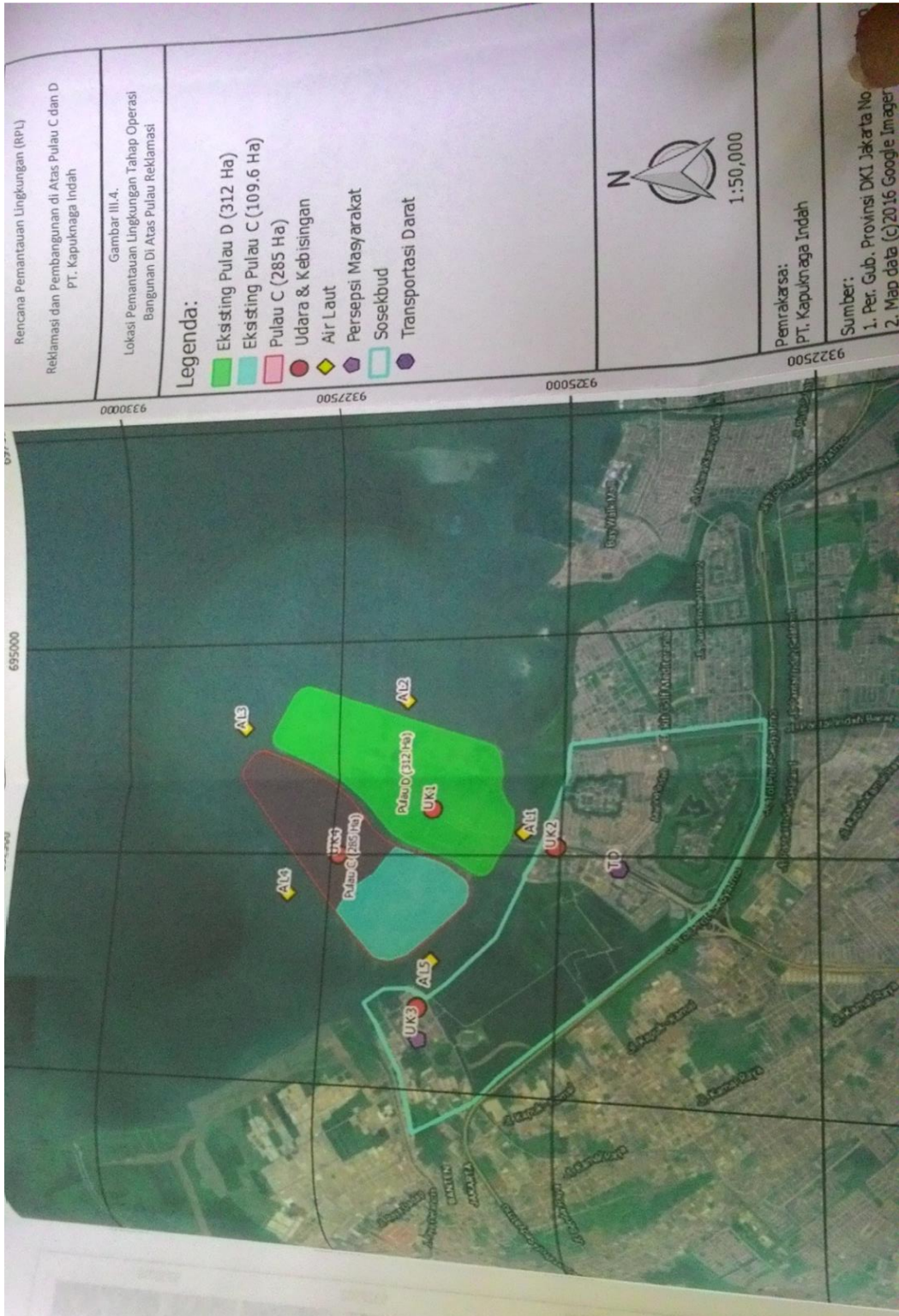
Pemerintah DKI bertujuan untuk merelokasikan penduduk kumuh di kompleks perumahan sewa yang dikenal sebagaimana sistem Rusunawa, misalnya di daerah Marunda (Foto 4.3) di mana terdapat Rencana Kompleks Pemukiman dengan perumahan sewa (Rusunawa sistem). Pemerintah DKI juga berencana untuk membangun 38 blok untuk 3.800 famili. Pada tahun 2011, pemerintah DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan Rusunawa ini untuk penghuni kawasan kumuh. Di sebelah kompleks Rusunawa merupakan daerah perumahan di sekitar Marunda Pulo dengan kondisi kumuh.

Proses Reklamasi Pulau C dan D tanpa adanya AMDAL Data dokumen pembahasan AMDAL setelah pulau terselesaikan dan sudah berdirinya bangunan di atas lah









Tabel 4.4. Penggunaan Lahan Pesisir Kabupaten Bekasi di Zona Timur Teluk Jakarta

Tipologi	Kecamatan Muara Gembong (Ha)	Kecamatan Babelan (Ha)	Kecamatan Tarumajaya (Ha)
Pemukiman perkotaan / desa	3023	4264	3192
Hutan Lindung	6699	77	118
Hutan Produksi	4991	334	
Industri	-	2508	2075
Pelabuhan	-	742	
Pariwisata	713	-	-
Rehabilitasi Bakau	6700	-	-
TPU (Tempat Pemakaman Umum)	-	-	19



Gambar 4.192 Penggunaan lahan di sepanjang garis pantai daerah penelitian disalin dari Badan pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Presentasi yang tidak bertanggal berjudul "Penataan Dan Pengelolaan Pantai Utara Jakarta: Revitalisasi Dan Reklamasi"

Fitur utama penggunaan lahan akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut.

Jumlah pekerja dan petani dan produksi kerang hijau di Kamal Muara dan desa-desa Cilincing berjumlah 2.006 pada tahun 2009 (Tabel 4.8), dengan total produksi 35.768 (Tabel 4.9).

Tabel 4.8 Petani kerang hijau di Jakarta Utara tahun 2005 - 2009

Tahun	Desa Kamal Muara (orang)			Desa Cilincing (orang)			Total (orang)		
	pemilik	pekerja	total	pemilik	pekerja	total	pemilik	pekerja	total
2005	390	650	1,040	260	720	980	650	1,370	2,020
2006	352	585	936	235	648	883	587	1,233	1,820
2007	-	-	-	60	175	235	60	175	235
2008	412	824	1,236	307	1,535	1,842	719	2,359	3,078
2009	135	245	380	326	1,300	1,626	461	1,545	2,006

Tabel 4.9 Jumlah Bagan dan produksi kerang hijau di Jakarta Utara

Year	Desa Kamal Muara		Desa Cilincing		Total	
	Bagan (Unit)	Produksi (Ton)	Bagan (Unit)	Produksi (Ton)	Bagan (Unit)	Produksi (Ton)
2005	498	70,500	1,299	200,000	1,797	270,500
2006	448	63,500	1,160	180,000	1,608	243,500
2007	-	-	630	90,780	630	90,780
2008	1,216	18,240	1,396	34,900	2,612	53,140
2009	389	4,668	1,030	31,100	1,419	35,768

Hasil gambar kegiatan pengaruh reklamasi



Gambar: 0.1 Menuju pulau reklamasi pulau G





Gambar 0.2 Reklamasi pulau G posisi di atas lahan reklamasi jarak antara daratan Muara Angke





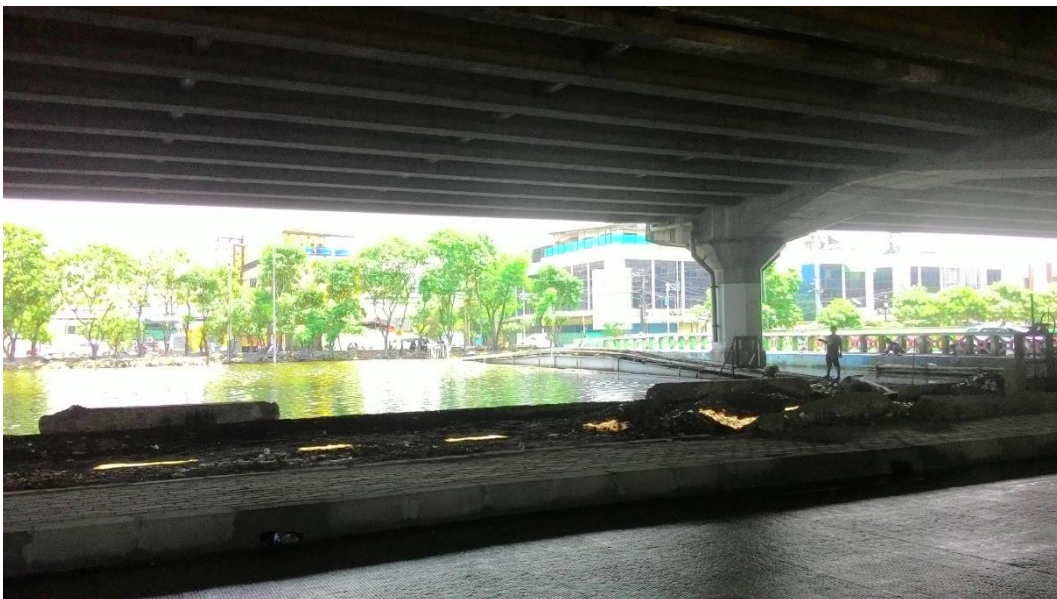
Gambar 0.3 Reklamasi pulau C yang sudah berdiri bangunan diatas lahan reklamasi



Gambar 0.4 Penurunan tanah di area Muara Angke.



Gambar 0.5 Dataran rendah muara akibat reklamasi sehingga *Drainase* aliran air menuju teluk Jakarta tidak mengalir dengan mudah.



Gambar 0.6 *Drainase* aliran air di area Ancol untuk menuju teluk Jakarta tidak mengalir, sehingga terjadi pengendapan air.



Gambar 0.7 salah satu kapal nelayan yang tidak melaut akibat reklamasi



Gambar 0.8 banyaknya kapal nelayan yang sudah tidak melaut, sehingga dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain, berenang dari atas kapal.



Gambar 0.9 Lahan yang dulunya menjadi tempat tinggal masyarakat kini dijadikan tempat parkir untuk para pengunjung wisata yang bertujuan kepulau.



Gambar 1.0 salah satu halte trans Muara Angke yang dimanfaatkan untuk berkumpul dan bermain masyarakat.



Gambar 1.1 Berdirinya pagar untuk mengurangi aktifitas masyarakat melalui pintu utama pelabuhan Muara Kali Adem.



Gambar 1.2 Bus Trans Jakarta kawasan kali adem



Gambar 1.3 Berkurangnya hasil tangkapan ikan para Nelayan.





Gambar 1.4 Berkurangnya hasil kerang yang sudah mulai sulit didapatkan.



Gambar 1.5 Kapal-kapal nelayan yang sudah tidak melaut akibat mencari kerang laut yang harus lebih jauh dari area pulau F, I, dan K



Gambar 1.6 Banyaknya para nelayan yang sudah berhenti untuk melaut.



Gambar 1.7 Salah satu masyarakat nelayan yang sudah tidak melaut selama satu tahun setengah yaitu Bapak Suhali.